

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur :

Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII-Press.

_____ dan Soleman B. Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____ dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sugangga, IGN., 2002, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Hukum Pertanahan Adat di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Penentuan Hak Tanah Timbul Dalam Masalah-Masalah Hukum)*, Majalah Ilmiah FH-UNDIP, Vol. XXXI.No.2, April-Juni 2002.

Sumardjono, Maria SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wahyukismoyo, Heru, 2008, *Merajut Kembali Pemikiran Sultan Hamengkubuwono IX*, Dharmakaryadhika Publisher.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional
Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis;

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan
Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi
DIY.

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Berlaku
Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY.

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 Tentang Masalah Cina;

Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 Tentang Larangan Hak Milik
Bagi WNI nonpribumi;

C. Data Dari Internet :

www.hukumonline.com

www.nusantaranews.wordpress.com

www.tentangjogja.wordpress.com

<http://id.scribd.com/doc/33264088/Aturan-UU-Diskriminat>

D. Lainnya :

Draft RUUK DIY versi Tim JIP Fisipol UGM, *dalam Monograph on Politics and
Government* Vol.2 Nomor 1 Tahun 2008.

H.BRM. Sulaksono, 1992, *Pengaruh Sistem Penggajian Terhadap Produktivitas Kerja (Suatu Penelitian di Kalangan Pegawai Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat)*, Skripsi, FISIP Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.

Monograph on Politics and Government Vol.2 Nomor 1, 2008, hal. 87-88, Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM-Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.